

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA AMBON, 1992-2006)**

Samie Lambert Jacobs

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen
Rutu Nusa - Ambon

Abstract: *Intention of this research see influence of expenditure local government to economic growth of area and government to indentification of expenditure see from routine expenditure, development expenditure for the area of economic, area social, common/ public area, and area subsidize the development of economic bottom area to growth rate of area in town Ambon regency. The data used by the form of secondary data, time series year 1992 - 2006*

The analysis data conducted with the statistical analysis - econometrics is inclusive of in it analyse the linear regression Ordinary Least Square (OLS). Result of statistical analysis to show the test t and the test f signifikan at real level $\alpha = 5\%$. Pursuant to result of research to showing that governmental expenditure variable at routine expenditure, common/ public area development expenditure, of subordinate area have an effect on to economic growth rate area, for a while of expenditure variable for the area of economic and social area do not have an effect on to economic growth area in town ambon regency. Test the coefficient of determinasi R^2 to show that 38,67% variation to change of variable dependen able to be explained by variation of independent variable change, while rest 62,43% representing other dissimilar residual variable to outside model.

Keyword: *expenditure local government, to economic growt*

PENDAHULUAN

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut maka, pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian: (1) suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, (2) usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan (3) kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang, (4) perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Menurut Wijaya, (1999:327) pembangunan ekonomi merupakan usaha secara sadar dan kontinyu berjangka panjang untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita serta menaikkan taraf hidup rakyat. Karena itu harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang logis. Menurut Mangkoesoebroto (1993:2) dalam perekonomian modern peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) peranan alokasi sumber-sumber ekonomi; (2) peranan distribusi pada pendapatan dan kekayaan; dan (3) peranan stabilisasi perekonomian.

Menurut Jones (1996:10) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian secara langsung di antaranya adalah berkaitan dengan masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Agar pembangunan dapat terlaksanakan dan memberikan hasil yang optimal, maka diperlukan suatu dokumen rencana strategis (renstra) sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program-program pembangunan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan renstra dikaji dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu pertumbuhan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi. Alkadri, (1999) meneliti sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1969-1996. Variabel penjelas yang digunakan sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi adalah aliran neto utang luar negeri pemerintah dan swasta, realisasi investasi swasta asing dan swasta domestik yang disetujui, ekspor dan impor barang, tabungan pemerintah dan swasta, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Solow-Swan mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1997: 57). Pandangan ini mengartikan bahwa sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung penambahan produk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Todaro (1997:105) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dipengaruhi oleh akumulasi modal yang mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisik, dan semua sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi.

Melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah terus meningkat hampir di segala macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Peranan pengeluaran pemerintah terletak pada laju pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran serta mendorong usaha sektor swasta. Dalam APBD Pemerintah Kota Ambon, pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran konsumtif pemerintah sedangkan pengeluaran pembangunan

adalah pengeluaran investasi pemerintah yang bersifat menambah kapiatal masyarakat. Dalam kurun waktu 1992-2006 pengeluaran rutin meningkat rata-rata sebesar 85,26% per tahun dan pengeluaran pembangunan meningkat rata-rata sebesar 47,33% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan bertumbuh dan berkembang apabila ada pertumbuhan *output*. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Ambon selama kurun waktu 15 tahun mencapai angka pertumbuhan sebesar Rp.1.421.960,45. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran rutin dan rata-rata pengeluaran pembangunan daerah.

Baik tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah itu tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah itu terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan swasta akan menjadi kecil, para individu dan juga badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan atau keuntungan yang maksimal. Untuk menilai efisiensi pemerintah, haruslah didasarkan pada pengaruh dari kebijakan pemerintah tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap alokasi sumber, atau kombinasi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Kriteria yang pada umumnya digunakan untuk menilai efisiensi kebijakan pemerintah adalah keadilan (*equity*), efisiensi ekonomi (*economic efficiency*), kebapakan (*Paternalisme*), dan kebebasan perorangan (Suparmoko, 1987: 32-33).

Dalam konteks perekonomian negara sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting dalam rencana pembangunan negara terbelakang dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan dengan rencana keuangan. Penerapan rencana keuangan dan pencapaian perimbangan dalam arti riil dan keuangan jelas banyak tergantung pada tindakan-tindakan fiskal.

Akumulasi modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan) peralatan fisik dan semua sumber daya manusia (*human resources*). Dalam hal ini, akumulasi modal akan terjadi bila ada proporsi dari pendapatan sekarang yang ditabung dan selanjutnya diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang. Investasi ini dapat berupa barang-barang modal produktif yang pada gilirannya akan meningkatkan *output* yang lebih besar bagi suatu negara. Investasi yang lain adalah infrastruktur sosial ekonomi yaitu jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi yang akan mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi, (Hukom, 2004:11).

Memperjelas pemikiran di atas sesuai kajian ini yang menyoroti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah, maka tentunya bila pengeluaran pemerintah (X) meningkat, maka investasi (I) akan meningkat, maka jumlah produksi (Q) akan

meningkat dalam hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan produksi maka akan meningkatkan pendapatan (Y), dengan meningkatnya pendapatan akan meningkatkan penerimaan pajak (Tx), yang pada gilirannya akan meningkatkan pengeluaran pemerintah (X).

Masalah yang dihadapi adalah pengeluaran pembangunan pemerintah daerah diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada sisi lain, peningkatan pengeluaran pembangunan yang tinggi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk: (a) mengidentifikasi pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Pemerintah Kota Ambon, (b) menguji efektivitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder periode 1992 sampai tahun 2006. Data sekunder tersebut adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB), total realisasi pengeluaran rutin pemerintah kota Ambon, pengeluaran pembangunan di bidang ekonomi, pengeluaran pembangunan bidang sosial, pengeluaran pembangunan bidang umum. Data yang diamati diperoleh dari pemerintah kota Ambon dalam angka, Badan Pusat Statistik kota Ambon, dan Maluku dalam angka dengan periode pengamatan tahun 1992 sampai tahun 2006.

Tabel 1
Perkembangan PDRB atas Harga Dasar Konstan dan
Periode, 1992–2006 (dalam Rp juta)

Tahun	PDRB
1992	224.005,89
1993	614.821,87
1994	674.865,29
1995	74.438,54
1996	814.922,69
1997	861.610,08
1998	799.261,06
1999	62.840,95
2000	559.267,10
2001	519.496,15
2002	1.126.265,19
2003	1.189.655,24
2004	1.257.863,16
2005	1.335.961,80
2006	1.421.960,45

Sumber : BPS Maluku, PDRB Kota Ambon, diolah

Perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun bukan saja disebabkan oleh perubahan tingkat ekonomi tetapi juga oleh kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDRB selama tahun penelitian harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung PDRB menurut harga konstan (PDRB) riil.) Di mana, PDRB riil berdasarkan harga konstan dihitung dengan rumus:

$$\text{PDRB riil} = \frac{\text{PDRB atas Harga Berlaku}}{\text{Indeks Harga Konsumen}} \times 100\%$$

Kemudian data PDRB riil diolah untuk memperoleh data laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB riil tahun ini} - \text{PDRB tahun lalu}}{\text{PDRB riil tahun lalu}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan *output* dalam jangka panjang yang mana diukur dengan perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi kota ambon yang diukur dengan perkembangan PDRB dari tahun ke tahun adalah perubahan PDRB yang digunakan berdasarkan atas harga konstan dapat dilihat pada tabel 1.1. Dilihat dari angka-angka yang disajikan dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi daerah kota ambon mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi daerah kota ambon pada tahun 1992 mencapai angka 224.005,89.

Memasuki tahun 1993-1994 angka laju pertumbuhan daerah Kota ambon kembali terjadi kenaikan hingga 674.865,29 angka tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 1995 hingga 74.438,54. Tetapi kemudian meningkat menjadi 861.610,08 pada tahun 1997 dan kembali terjadi penurunan pada tahun berikutnya. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus menurun ini disebabkan karena terjadinya konflik kemanusiaan yang imbasnya terhadap pertumbuhan ekonomi kota ambon pada tahun 1999, dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi sampai pada pertengahan tahun 2001 yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi pun terus mengalami perubahan yang terlihat mulai dari tahun 2001 sampai 2006 di mana perkembangan pertumbuhan mencapai 1.421.960,45 angka ini merupakan perkembangan pertumbuhan ekonomiyang sangat baik dari 15 tahun belakangan ini, hal ini disebabkan karena struktur sosial ekonomi kota ambon suda mulai membaik akibat konflik kemanusiaan yang melanda kota ambon dan maluku pada umunya tahun 1999.

Model

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuadrat terkecil (**Ordinary Least Square**) atau yang disingkat **OLS**. Berdasarkan pada model tersebut, maka hubungan pengeluaran pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah dapat diformulasikan kedalam fungsi sebagai berikut:

$$Y_t = f(X_t)$$

$$Y_t = f(X_{1t}, X_{2t}, X_{3t}, X_{4t}, X_{5t})$$

$$Y_t = \ln a_0 + a_1 \ln X_{1t} + a_2 \ln X_{2t} + a_3 \ln X_{3t} + a_4 \ln X_{4t} + a_5 \ln X_{5t} + u_t$$

Di mana,

Y : Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun ke t

X_{1t} : Pengeluaran rutin pada tahun ke t

X_{2t} : Pengeluaran pembangunan untuk bidang ekonomi pada tahun ke t

X_{3t} : Pengeluaran pembangunan bidang sosial pada tahun ke t

X_{4t} : Pengeluaran pembangunan untuk bidang umum pada tahun ke t

HASIL

Metode OLS

Dengan demikian bentuk model yang dipilih adalah model lin-log (Gujarati, 2003 : 281).

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1t} + \beta_2 \ln X_{2t} + \beta_3 \ln X_{3t} + \beta_4 \ln X_{4t} + u_t$$

Hasil estimasi yang diperoleh dari model di atas adalah

Tabel 2
Hasil Uji MWD

Nilai Z	T statistik	Prob.	Ket
Z1	-2,6381	0,0231	Ho ditolak
Z2	3,6217	0,0040	Ho ditolak

Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa untuk uji Z1 dan Z2 Ho ditolak hal ini menunjukkan bahwa baik model linier maupun lin-log dapat digunakan. Untuk dapat memperkuat alasan pemilihan model, dilakukan pengujian dengan membandingkan nilai R² dari kedua bentuk model tersebut. Dari hasil yang diperoleh bahwa nilai R² untuk model lin-log lebih besar dari pada model linier. Dengan demikian bentuk model yang dipilih adalah model lin-log (Gujarati, 2003 : 281).

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1t} + \beta_2 \ln X_{2t} + \beta_3 \ln X_{3t} + \beta_4 \ln X_{4t} + u_t$$

Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dengan nilai t tabel (0,05 ; 12) = ± 2,179 dan nilai t statistik sesuai Tabel dapat dibaca bahwa secara parsial variabel X₄

signifikan pada $\alpha = 5\%$, artinya variabel independen X_{4t} (pengeluaran pembangunan untuk bidang umum) berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen Y_t (pertumbuhan ekonomi daerah). Untuk variabel independen X_{1t} , X_{2t} , dan X_{3t} , tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ artinya variabel independen X_{1t} (pengeluaran rutin), X_{2t} (pengeluaran pembangunan bidang ekonomi), dan X_{3t} (pengeluaran pembangunan bidang sosial), tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen Y_t (pertumbuhan ekonomi daerah).

Tabel 3
Hasil Estimasi Model

Variable	Koefisien	t statistik	Prob.
Konstanta	69,1832	1,5623	0,1442
LnX _{1t}	-5,9625	-2,0215	0,0661
LnX _{2t}	1,1160	0,4003	0,6960
LnX _{3t}	-1,5354	-0,3927	0,7473
LnX _{4t}	11,1635	2,4762*	0,0294
R square : 0,3949			
Adjusted R square : 0,1428			
F statistic : 1,5664			
DW statistic : 1,8252			

Ket.: *) signifikan pada $\alpha = 5\%$

Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan nilai F tabel (0,05 ; 5 ; 13) = $\pm 3,03$ dan nilai F statistik sesuai Tabel dapat dibaca bahwa F statistik lebih kecil dari F tabel. Hal ini berarti secara bersama-sama pengeluaran pemerintah daerah di Pemerintah Kota Ambon tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Uji autokorelasi

Untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi dengan derajat tingkat tinggi digunakan uji Breusch dan Godfrey (B-G test). Dari Tabel 3.5 diperoleh nilai B-G test = 4,6458 yang jika dibandingkan dengan nilai X^2 tabel (0,05 ; 2) = 5,9915 maka nilai B-G test lebih kecil dari nilai X^2 tabel. Hal ini berarti H_0 tidak dapat ditolak, yang artinya tidak terdapat autokorelasi terhadap residual pada persamaan.

Tabel 4
Hasil uji *Breusch-Godfrey serial correlation LM test*

F-statistik	2,6792	Probability	0,101915
Obs*R-squared	4,6458322	Probability	0,097987

Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan uji White heteroskedastisitas (*no cross term*), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan ditolak. Hal ini dikarenakan nilai χ^2 hitung ($\text{Obs} \times \text{R-squared}$) = 14, 2713 lebih kecil jika dibandingkan dengan χ^2 tabel (0,05 ; 18) = 18,3070 dengan tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$. Dengan demikian, hasil uji dengan menggunakan uji White heteroskedastisitas (*no cross term*) tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan.

Uji multikolinieritas

Hasil pengujian gejala multikolinieritas dengan menggunakan korelasi parsial (*examination of partial correlation*) adalah sebagai berikut :

Nilai R-squared

LnX1t (LnX2t, LnX3t, LnX4t)	: 0,742193
LnX2t (LnX1t, LnX3t, LnX4t,)	: 0,836844
LnX3t (LnX1t, LnX2t, LnX4t,)	: 0,891513
LnX4t (LnX1t, LnX2t, LnX3t,)	: 0,904115

Dari keempat R^2 regresi parsial antara variabel independen tersebut, berpedoman pada *rule of thumb* dari metode Farrar dan Glauber, ternyata masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai R^2 model empiris yang diuji, yaitu 0,3949. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan korelasi parsial, diketahui model yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan gejala multikolinieritas. metode penyembuhan adalah dengan mengeluarkan satu atau beberapa variabel yang saling berkolinier.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 + \text{LnX1t} + \beta_2 \text{Ln X4t} + u_t$$

Dengan hasil estimasi sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Estimasi Model Empiris yang baru

Variabel	Koefisien	T statistik	Probabilitas
Konstanta	64,8455	39,6719	0,1244
LnX1t	6,2896	2,4155	0,0208
LnX4t	11,242	4,1318	0,016
R squared	: 0,3867		
Adjusted R squared	: 0,2553		
F statistik	: 2,9436		
DW statistik	: 1,8489		

Sumber : data diolah

Dari hasil tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk uji t masing-masing variabel X_{1t} , X_{4t} , signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap variabel Y_t , pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian pula untuk uji F secara bersama-sama Variabel X_{1t} , X_{4t} , berpengaruh secara signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap variabel Y_t pertumbuhan ekonomi daerah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji model hubungan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Ambon. Secara teoritis peranan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila pengeluaran pemerintah meningkat akan meningkatkan investasi yang mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi akan meningkatkan pendapatan, peningkatan pendapatan akan meningkatkan pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dengan melihat bahwa ada beberapa variabel pengeluaran pemerintah (X_t) yang tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi daerah (Y_t), maka ada beberapa kemungkinan yang dapat diamati.

Kemungkinan yang pertama adalah kecilnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu hanya meliputi 15 tahun. Pada sisi lain pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang melebihi dari 15 tahun, atau lebih sehingga belum bisa dilihat secara optimal. Kemungkinan kedua adalah pengalokasian pengeluaran pemerintah tersebut lebih banyak diarahkan pada sektor yang kurang produktif. Kemungkinan lain adalah terjadinya penyimpangan terhadap dana belanja pemerintah.

Pertumbuhan pengeluaran secara umum ternyata di sebabkan oleh pertumbuhan pada pengeluaran rutin pemerintah. Pertumbuhan untuk masing-masing jenis pengeluaran tampak sangat fluktuatif, hal ini terkait dengan sumber pendanaannya yang sebagian besar bersumber dari bantuan pemerintah pusat yang turut menentukan pula pengalokasiannya, sehingga kebijakan yang cenderung menggambarkan kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan nilai rata-rata proporsi pengeluaran masing-masing jenis pengeluaran, maka tampak sebagian besar digunakan untuk pengeluaran rutin dengan proporsi rata-ratanya sebesar 52,66%. Sementara rata-rata proporsi pengeluaran pembangunan sebesar 47,33%. Tingginya pengeluaran rutin terutama ditentukan oleh belanja pegawai, sedangkan penggunaan pada pengeluaran pembangunan secara umum rata-rata digunakan pada bidang ekonomi 46,29%, bidang sosial 27,69%, bidang umum 8,17% dan subsidi pembangunan daerah bawahan sebesar 17,83%. Analisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan hasil yang positif dan meyakinkan. Secara konkrit pengaruh yang positif tersebut berarti bahwa Pemerintah Kota Ambon telah menunjukkan peranannya sebagai institusi pemerintah yang secara tak langsung mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengkajian mengenai pengaruh kebijakan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara kuantitatif telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan model persamaan lin-log. Setelah melalui berbagai tahapan

pengujian secara statistik maupun ekonometrik, model menunjukkan bahwa kebijakan pengeluaran rutin (X_{1t}) dan pengeluaran pembangunan hanya di bidang umum (X_{4t}) yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara positif dan signifikan di Kota Ambon.

Besaran koefisien pada masing-masing variabel independen menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel independen. Variabel pengeluaran rutin (X_{1t}) memiliki koefisien sebesar 6,289 yang berarti apabila pengeluaran rutin terhadap PDRB meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat sebesar 6,29%; variabel pengeluaran pembangunan di bidang umum (X_{4t}) memiliki besaran koefisien sebesar 11,242 yang berarti apabila pengeluaran pembangunan di bidang umum (X_{4t}) terhadap PDRB meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat sebesar 11,24%.

Nilai elastisitas variabel pengeluaran rutin (X_{1t}) dan variabel pengeluaran pembangunan bidang umum (X_{4t}) bersifat in-elastis terhadap variabel pertumbuhan ekonomi daerah (Y_t), yang berarti penurunan pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan bidang umum dan pengeluaran pembangunan subsidi pembangunan daerah bawahan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah. Presentase kenaikan variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan bidang umum dan subsidi pembangunan daerah bawahan lebih kecil dari persentase kenaikan variabel pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi daerah adalah sumber daya kapital (modal), sumber daya tersebut bisa digali dari sumber dana pemerintah daerah berupa pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi faktor-faktor produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Ambon periode 1992-2006 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di mana alokasi pengeluaran pemerintah lebih pada pengeluaran rutin (X_1), pengeluaran pembangunan pada bidang umum (X_4).
2. Pengeluaran pembangunan pada bidang ekonomi (X_2) dan pengeluaran pembangunan bidang sosial (X_3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Y_t) di Pemerintah Kota Ambon.

SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, maka disarankan sebagai berikut. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Pemerintah Kota Ambon perlu adanya pengelolaan terhadap alokasi pengeluaran pemerintah daerah. Dalam hal ini disarankan untuk mengarahkan pengeluaran

pemerintah ke sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas terutama untuk pengeluaran rutin (X1), pengeluaran pemerintah bidang umum (X4).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, (1997). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ketiga, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- _____, (1999). *Pengantar perencanaan dan Pembangunan*, Edisi pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik, *Provinsi Maluku Dalam Angka*, berbagai terbitan Provinsi Maluku.
- _____, *Kota Ambon Dalam Angka*., dalam angka berbagai terbitan Kota dalam angka.
- Gujarati, Damodar, N., (2003). *Basic Econometrics*, Third Edition, Mc. Graw _ Hill International Edition.
- Hukom, Alexandra, (2004). "Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah," *Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM Yogyakarta* (tidak dipublikasikan).
- Jones, Bernard, (1996). *Financial Management in the Public sector*, Mc-Graw Hill Companies, England.
- Mangkoesebroto, Guritno, (1993). *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta
- Suparmoko, M., (1987). *Keuangan Negara, dalam Teori dan Praktek*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Todaro, MP., 1997. *Economic Development*, seventh edition, Longman Inc., England.
- Wijaya, Faried, (1999). *Pengantar Ekonomika Makro*, Edisi Ketiga Penerbit BPFE Yogyakarta